

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di setiap negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan juga merupakan permasalahan multisektoral dan multidimensional terjadi bukan hanya karena satu sebab tetapi disebabkan oleh beragam faktor yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya. Terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia juga menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat, antara lain masalah kemiskinan yang memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Pengertian kemiskinan itu sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.¹ Oleh karena itu penanganan kemiskinan harus secara lintas sektoral dan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah manusia itu sendiri, seperti sikap mental konsumtif, mental pesimistis, tidak suka berjuang, ketergantungan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, baik pendidikan maupun *life skill*.

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> tanggal 21.02.2015 jam 12.11

Faktor eksternal berupa faktor geografis yang tidak mendukung, sumber daya alam yang “miskin”, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat luas, bahkan pengaruh dunia internasional juga turut menjadi penyebab munculnya kemiskinan baru.²

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain bahwa Negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Setiap warga Negara juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial bagian dari pada Pembangunan Nasional, proses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta membutuhkan keterpaduan berbagai pihak. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap dan masyarakat dalam rangka meningkat kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan

²*Petunjuk Teknis Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Tahun Anggaran 2012*, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2012, Hal. 1.

batin. Penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dengan adanya otonomi daerah, posisi daerah menjadi sangat strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda, sehingga dibutuhkan strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan yang spesifik.

Terkait dengan hal diatas memang kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia termasuk di Kabupaten Purbalingga. Upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan antara lain dengan berbagai program pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan berbagai program lainnya.

Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan presentase kemiskinan sebesar 23,06 persen pada tahun 2011. Hal ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 24,57 persen. Meskipun pesentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga telah mengalami penurunan, namun hakekatnya jumlah keseluruhan penduduk miskin masih relatif tinggi. Hal ini mengharuskan upaya lebih keras dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengupayakan Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

melalui Dinas Sosialnya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga/keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang/keluarga-keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Unsur Pokok KUBE terdiri atas 10 orang (KK) fakir miskin yang telah terpilih melalui seleksi sebagai Keluarga Binaan Sosial (KBS), adanya kemauan anggota KUBE untuk bekerja secara kelompok dan adanya kesamaan minat dari anggota untuk melaksanakan suatu jenis Usaha Ekonomi Produktif atau Usaha Kesejahteraan Sosial (UEP/UKS) melalui kegiatan kelompok. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibentuk berdasarkan musyawarah bersama antar anggota Keluarga Binaan Sosial (KBS) Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Penentuan jenis kegiatan usaha kelompok dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan potensi alam yang ada. Terhadap kelompok yang telah terbenggal untuk diberikan latihan keterampilan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan. Pemberian bantuan sarana dan prasarana. Pendampingan mempunyai peran yang sangat

penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok yang miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang di bantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), dan Panitia Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS). Penentuan 10 KBS tersebut sebagai anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).³

Tujuan dan Sasaran Program KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui : Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, Peningkatan pendapatan, Pengembangan usaha, Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan sasaran Penerima bantuan stimulant pemberdayaan adalah para Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang tergabung dalam KUBE, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan atau kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.⁴

Agar Program KUBE berjalan dengan baik harus diadakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan

³<http://pekerjasosialtuban.wordpress.com/2011/08/25/kube-pemberdayaan-fakir-miskin> diakses tanggal 5 november 2014.

⁴Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, op.cit., 2012, Hal 3.

pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupate/kodya, kecamatan dan desa/kelurahan secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kodya, provinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang.⁵

Alasan penulis memilih lokasi di Desa Sidanegara kecamatan Kaligondang karena Program KUBE di desa tersebut pelaksanaannya berhasil bahkan berprestasi di tingkat provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Program KUBE berhasil dilaksanakan di Desa Sidanegara.

⁵Ibid, Hal. 11.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KUBE dalam mendorong kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana Program KUBE dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga (Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program KUBE dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga khususnya di Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan dari implementasi Program KUBE dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pemerintahan pada umumnya dan pengetahuan tentang pelaksanaan program-program dari pemerintah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai salah satu bahan

pertimbangan dalam menentukan implemetasi program-program pengentasan kemiskinan khususnya Program KUBE.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan uraian penjelasan mengenai variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Sehingga nantinya akan nampak jelas, sistematis, dan ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian. Adapun pengertian dari teori itu sendiri adalah

Masri Singarimbun dan Sofyan menjelaskan tentang teori :

“Serangkaian konsep, kontrol, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”⁶

Koentjaraningrat mendefinisikan teori sebagai berikut :

“Pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁷

Sesuai dengan difinisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya suatu penelitian ilmiah adalah rangkaian penyelidikan yang sistematis yang dipandu dengan menggunakan teori-teori tertentu sebagai bagian dari upaya menjelaskan suatu fenomena atau gambaran umum suatu kejadian yang terjadi dalam masyarakat secara umum.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Kebijakan Publik, Implementasi Program, Pelayanan Masyarakat. Teori implementasi program menurut George C. Edward III, alasan peneliti menggunakan teori tersebut

⁶Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survay*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.37.

⁷Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1999, hal 9.

karena teori ini menggambarkan pelaksanaan suatu proses yang meliputi input, proses, dan output. Untuk mengetahui input dan proses program di analisa dengan teori Edward yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan birokrasi. Sedangkan untuk yang outcome di analisis dengan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Lenvine yang meliputi aspek responsivitas, responsibility, akuntabilitas.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu faktor keberhasilan dari pemerintah. Dalam teori pareto, kebijakan publik ialah faktor penentu 20% yang menyebabkan 80%. Jadi kebijakan publik merupakan faktor penentu kritikal bagi kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Menurut Heinz Eulau, Kebijakan Publik adalah keputusan tetap yang bercirikan dengan adanya konsistensi dan penanggulangan (*repetitiveness*) pada tingkah laku pembuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.⁸

Kebijakan publik berarti mengenai apa saja yang diucapkan (*says*) dan apa saja yang dilakukan (*does*) oleh pemerintah tentang suatu persoalan berarti juga kebijakan publik merupakan sebuah statement dan tindakan nyata pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Segala apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tertentu tersebut merupakan suatu bentuk keputusan yang diambil.

Dalam mencapai tujuan negara pemerintah membutuhkan kebijakan sebagai alat untuk mengatur langkah yang akan diambil, karena ditengah

⁸ [Ulul@unitomo.ac.idhttp://www.unitomo.ac.id/artikel/ululalbab/public_polecy_5.pdf](http://www.unitomo.ac.id/artikel/ululalbab/public_polecy_5.pdf).

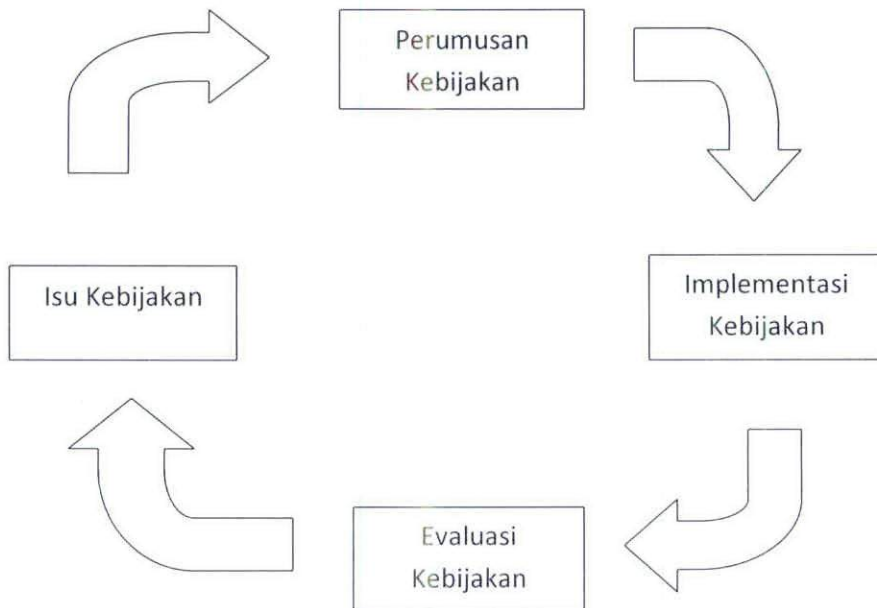
masyarakat pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya tanpa dibantu oleh kebijakan publik. Mengutip dari buku *public policy* dikembangkan dari diskusi dengan prof. Dr. Eko Prasajo guru besar ilmu administrasi, pada dasarnya dalam memahami kebijakan publik ada dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu kontinentalis dan Anglo-saxonis.⁹

Yang berarti kebijakan publik merupakan produk dari negara atau pemerintah, sedangkan masyarakat sebagai penerimanya. Sedangkan Anglo-saxon memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Sehingga interaksi tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat saja, namun masyarakat dengan negara. Karena masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, tidak hanya sebagai penerima kebijakan yang dibuat pemerintah.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kebijakan publik yang akan menentukan keberhasilan suatu negara. Sehingga sangat dibutuhkan suatu kebijakan publik yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Secara ideologis, teoritis, dan metodologis sistematika pembuatan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

⁹ Dr. Riant Nugroho, *Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan. Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Managemen Dalam Kebijakan Publik. Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2008.

Gambar 1.1. Sistematika Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber : Ibid¹⁰

Gambar diatas dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut :

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini dianggap sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan

¹⁰ Ibid

publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan mengacu pada permasalahan dari pada antisipasi kedepan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani,

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warga negara, termasuk pimpinan negara,
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat,
4. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik dan benar,
5. Implementasi kebijakan bermula pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan langsung oleh pemanfaat,
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Istilah *policy* (kebijaksanaan) sering kali penggunaannya saling dipertukaran dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan-keputusan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar.

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.¹¹

Carl Friedrich berpendapat bahwa :

*“kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.”*¹²

Sementara itu pendapat lain mengatakan “*policy* adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah mengenai problem yang Nampak.” Hein dan Eulau mengatakan : “*policy* adalah sesuatu keputusan yang tetap ditandai dengan adanya perhubungan dan keberulangan pada bagian-bagian dari keduanya yang membuat tunduk padanya.”¹³

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

¹¹ Candra Saptia Irawan, *Silabus Mata Kuliah Studi Implementasi Kebijakan*, Hal 2.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal. 3.

¹³ Charles. O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Grafindo, Jakarta, 1992, hal. 26.

Berbicara mengenai kebijakan dan program maka di dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan dan juga yang dimaksud dengan program :

1.1 Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Edi Suharto kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip dan cara bertindak secara terencana dan konsisten dengan tujuan tertentu demi kepentingan bersama.

1.2 Program

Menurut Charles O. Jones program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.¹⁴ Selain itu Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto memiliki pengertian lain dari program yang cenderung menjelaskan mengenai setiap usaha mencapai tujuan.¹⁵ W John M. Echols dan Hasan Shadily berpendapat bahwa program yaitu rencana atau rancangan mengenai apa-apa yang akan dilaksanakan.¹⁶

¹⁴ Charles. O. Jones, *Kebijakan Publik*. Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 49.

¹⁵ Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 78.

¹⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 450.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa program adalah rencana yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan sumber keterangan diawal tadi sudah barang tentu makna program disini yaitu program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Purbalingga.

2. Implementasi Program

2.1 Definisi Implementasi Program

Implementasi program dan kegiatan pada awalya merupakan kebijakan publik (*public policy*) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk program-program nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Implementasi program merupakan sub bagian dari implementasi kebijakan publik, maka implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program yang tergantung pada hasil (*out come*).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.¹⁷ Implementasi kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan publik (*goals of public policies*) menjadi hasil-hasil yang bisa dilihat. Jadi implementasi kebijakan publik merupakan fungsi dari implementasi program dan yang tergantung dari pada hasil-hasil (*out comes*) itu sendiri.

¹⁷Daniel A.M. dan Paul A.S. dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 2.

Pandangan para pakar mengenai implementasi program juga memperlihatkan berbagai kasualitas antara pelaku kebijakan dengan pencapaian tujuan kebijakan atau program. Selain itu tahapan implementasi dipandang sebagai tugas fungsional yang dilaksanakan setelah aktivitas formulasi, legitimasi, dan penganggaran kebijakan. Di bagian lain, Jones mengemukakan produk implementasi ini sangat bervariasi, yaitu dapat berupa pelayanan, pembayaran, kemudahan, pengawasan, dan sebagainya.

Lebih lanjut Jones menyatakan :

“sebuah program berisi tindakan yang diusulkan pemerintah yang dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan yang pencapaiannya problematik. Program aka nada apabila kondisi permulaan yaitu tahapan apabila hipotesis kebijakan telah dirumuskan. Kata ‘program’ sendiri menegaskan perubahan dari suatu hipotesis menjadi tindakan pemerintah. Sedangkan premis awal dari hipotesis tersebut telah disahkan dan derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat yang diharapkan disebut sebagai penerapan”.¹⁸

Implementasi program merupakan serangkaian aktivitas yang sangat kompleks. Implementasi berkaitan dengan akumulasi dan akuisisi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program. Badan-badan yang dipercaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus lebih dahulu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam arahan-arahan, peraturan serta desain dan rencana program riil. Badan yang diberi tugas sebagai implementator program harus mengatur perencanaan dan aktivitas dengan membentuk unit-unit pelaksana serta rincian kegiatan

¹⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal. 45.

rutin sesuai dengan beban kerjanya. Didalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementator program adalah Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur pokok implentasi program, yaitu :

- a. Implementasi program ialah serangkaian kegiatan yang merupakan tindakan lanjut setelah kebijakan ditetapkan, yang mana meliputi aktivitas pengambilan keputusan, langkah-langkah operasional yang strategis untuk mewujudkan program menjadi kenyataan,
- b. Implemetasi program dalam keadaan yang sesungguhnya jika ditinjau dari wujud hasilnya yang dicapai dapat berhasil, kurang ataupun gagal. Oleh karenanya dalam sutau proses implementasi berbagai unsur baik pendorong maupun penghambat turut mempengaruhi jalannya suatu program,
- c. Dalam implementasi program, setidaknya terdapat tiga unsur penting yaitu : adanya layanan (operasional) program yang dilaksanakan, adanya target group atau sasaran dari diadakannya suatu program dan unsur pelaksana atau implementator.

2.2 Model Implementasi Program

Implementasi kebijakan merupakan tahan yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Untuk hal tersebut beberapa pakar menawarkan mengenai konsep

implementasi dan model-model implementasi kebijakan, diantaranya adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edward III.

George C. Edward III mengemukakan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagu *public administration* dan *public policy*, implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan apabila kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.¹⁹

Lebih lanjut Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila didukung oleh 4 (empat) variabel pendukung, yaitu :²⁰

1. Variabel komunikasi, mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui secara persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan kebijakan harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.

¹⁹Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, Hal. 125.

²⁰Ibid, Hal. 126.

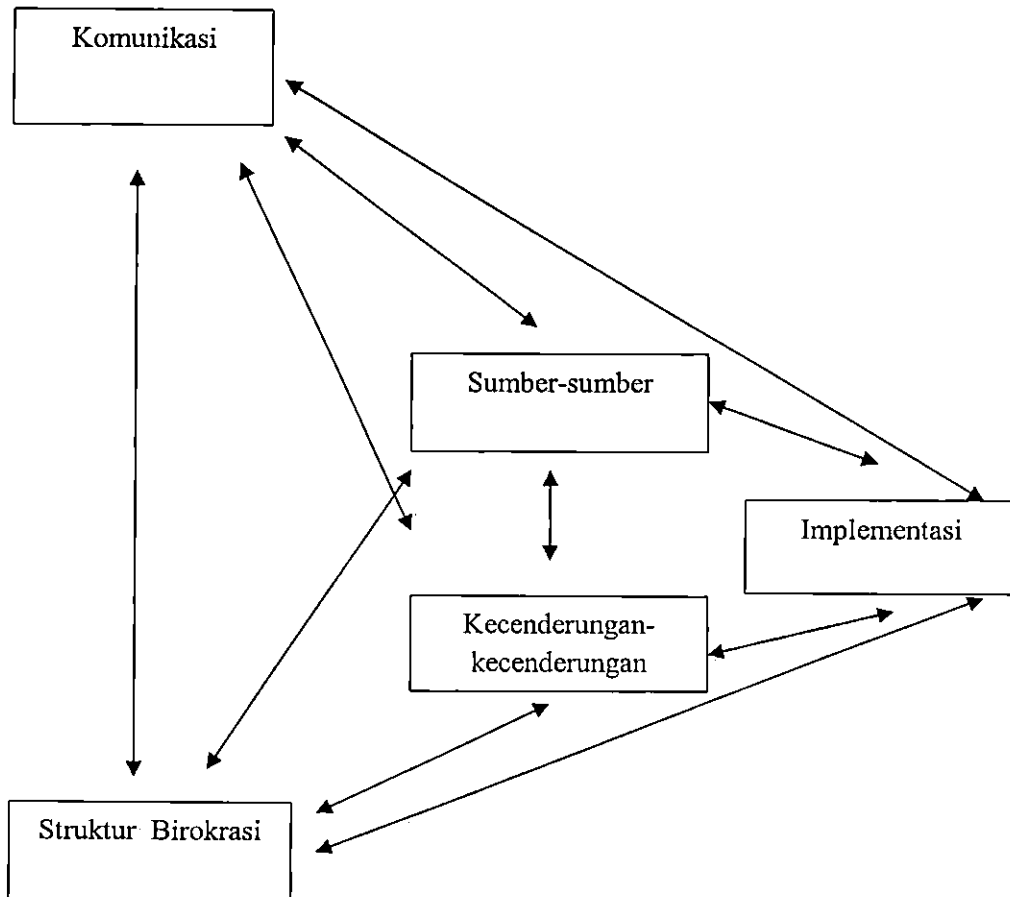
2. Variabel sumber daya, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia melainkan juga mencakup sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.
3. Variabel kecenderungan atau sikap pelaksana, sebagai kegunaan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan kebijakan dilakukan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang yang harus mereka kerjakan tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.
4. Variabel struktur birokrasi, bahwa struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan di dalam struktur. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan produser yang rutin, serta transformasi dalam pertanggung jawaban di antara unit organisasi.

Lebih lanjut Edwards III menjelaskan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan secara stimulan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua variable tersebut sekaligus.²¹

Keempat variabel tersebut dalam proses implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

²¹Ibid, Hal. 126.

**Gambar 1.2. Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut
George Edwards III**



Lebih lanjut Edwards III menyatakan pada masing-masing variabel tersebut terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses implementasi, yaitu :²²

²²Ibid, Hal. 126.

1) Variabel komunikasi

- a. Transmisi, penyampaian kebijakan yang telah diputuskan untuk dapat dijadikan pedoman sebagai suatu perintah untuk dilaksanakan
- b. Kejelasan (*Clarity*), memberikan penjelasan tentang kebijakan yang telah diputuskan tentang maksud, tujuan, target group, dll.
- c. Konsistensi, memberikan penjelasan yang tetap dan tidak berubah-ubah dalam menafsirkan kebijakan yang telah dibuat.

2) Variabel Sumber-sumber

- a. Staf, sumber daya manusia yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Informasi, penyampaian kebijakan kepada mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan kepatuhan terhadap hukum, pedoman yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, misalnya dalam mencairkan dana, menyeleksi target grup, dll.
- d. Fasilitas, yaitu dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan, seperti ruang kerja, kendaraan, dan lain-lain.

- 3) Variabel Kecenderungan-kecenderungan atau perilaku.
 - a. Dampak dari kecenderungan-kecenderungan atau perilaku yaitu kecenderungan atau sikap pandangan pribadi birokrat atau pelaksana terhadap program atau kebijakan publik.
 - b. Pengangkatan Birokrat, yaitu pengangkatan pejabat sebagai penanggung jawab kebijakan.
 - c. Insentif, yaitu memberikan insentif yang cukup memadai sebagai tanggung jawab yang diemban untuk melaksanakan kebijakan.
- 4) Variabel Struktur Birokrasi
 - a. Standard Operating Procedure, yaitu penyeragaman tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luar dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber-sumber.
 - b. Fragmentasi, yaitu tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa satuan organisasi.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*".Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa

kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas.Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi.Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial.Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis melainkan dinamis.

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.²³

Salah satu produk organisasi adalah pemberdayaan masyarakat menurut Lenvine.Maka produk pemberdayaan masyarakat di dalam Negara demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni *responsiveness, responsibility, dan accountability*.²⁴

²³ Priyono Onny S dan A. M. W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996.

²⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University press, 2005, hal. 147.

1. *Responsiveness* atau responsivitas adalah daya tangkap penyediaan layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, setelah itu semua tercapai maka masyarakat menjadi sejahtera.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis jenis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*).

Untuk meninatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan, dapat dilakukan dengan menggunakan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan :²⁵

1. Pemungkinan :

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan :

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-

²⁵Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran, Lembaga Studi Pembangunan STMS, Bandung, 1997, Op.cit, Hal. 218-219.

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan :

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus disarankan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan :

Memberikan bimbingan dan dukung agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan :

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (*public*).

2. Implementasi Program

Implementasi program adalah pelaksanaan kebijakan-kebijakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi diri sendiri, ini dapat terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.²⁶

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hal 6.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KUBE dalam mendukung kesejahteraan masyarakat :

1) Responsivitas

Daya tangkap atau kemampuan implementor kebijakan atau program dalam menanggapi aspirasi atau tuntutan masyarakat sasaran.

2) Responsibility

Sejauhmana pelaksanaan kebijakan atau program sesuai dengan prinsip-prinsip (SOP) yang telah ditetapkan.

3) Akuntabilitas

Seberapa besar pelaksanaan kebijakan atau program sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang pada kelompok masyarakat sasaran.

2. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui implementasi program KUBE di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga :

1) Komunikasi

a. Transmisi yakni kebijakan/program yang telah disampaikan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

b. Kejelasan (*Clarity*) yakni penjelasan mengenai program yang telah diputuskan.

c. Konsistensi yakni penjelasan informasi yang diberikan dengan tetap dan tidak berubah-ubah dalam menafsirkan program yang telah dibuat.

2) Sumber Daya

- a. Sumberdaya manusia yang diberi kewenangan untuk melaksanakan program.
- b. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana program sesuai dengan pedoman program yang telah ditetapkan.
- c. Kewenangan untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan program.
- d. Fasilitas yakni berupa dukungan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program.

3) Disposisi / Sikap Pelaksana

- a. Dampak dari sikap pandangan para pelaksana program/kebijakan.
- b. Pengangkatan birokrat/pejabat sebagai penanggungjawab program kebijakan.
- c. Insentif yakni memberikan insentif/kompensasi yang cukup bagi pelaksana program.

4) Struktur Birokrasi

- a. SOP yakni petunjuk pelaksanaan program bagi para implementor yang diberi wewenang untuk melaksanakan program.
- b. Fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab atau kewenangan bagi para pelaksana program.

H. BATASAN PENELITIAN

Batasan dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan program KUBE tahun 2012-2013 yang dilaksanakan di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.

I. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian sangat berperan dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya tujuan penelitian tersebut. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai macam cara kerja yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan telah ditetapkan pengetahuan yang bersangkutan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Alasan peneliti memilih menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena untuk :

²⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung, Hal. 32.

²⁸ Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1980, Jakarta, Hal. 63.

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di desa Sidanegara.
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi program KUBE di Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Karena salah satu desa yang mendapatkan program KUBE pada tahun 2012.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data menjelaskan mengenai apa atau siapa yang diteliti atau dianalisis. Sejalan dengan apa yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima program KUBE tahun 2012 di Desa Sidanegara yaitu 10 kelompok dengan sampel 1 orang setiap kelompok di Desa Sidanegara, Pendamping Program KUBE di Desa Sidanegara, perangkat Desa Sidanegara, Dinas Sosial kabupaten Purbalingga.

4. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang dijadikan objek penelitian yang terkait dengan pelaksanaan program KUBE di Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang, Purbalingga tahun 2012.

b. Data sekunder

Yaitu data yang didapat dari buku-buku ilmiah, laporan dari hasil penelitian, data statistik, media massa dan dokumen yang ada di wilayah Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga tahun 2012.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Dokumentasi, yaitu metode dimana penulis memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti : buku-buku, notulen, peraturan-peraturan, catatan harian, dll.

b. Wawancara, yaitu suatu percakapan dengan bertatap muka, dengan tujuan untuk memperoleh informasi aktual tentang masalah tertentu, sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas yakni penulis datang mengajukan pernyataan terlampir.²⁹ Responden untuk wawancara Ketua Kelompok KUBE 10 orang dan

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Madar Maju, Bandung, 1990, hal. 17.

Pendamping program KUBE di Desa Sidanegara, Sekertaris Desa Sidanegara, Kasie Asistensi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Nazir, analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³⁰ Selanjutnya penulis juga melakukan penafsiran dan interpretasi data. Menurut Nazir bahwa “penafsiran dan interpretasi tidak lain adalah pencarian data yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Secara umum penafsiran merupakan penjelasan terperinci mengenai arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan”.³¹ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

➤ Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa atau berbentuk uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit untuk dicerna apabila tidak direduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting dan dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

³⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 405.

³¹ *Ibid*, Hal. 437.

➤ Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi secara teratur agar data yang disampaikan secara tertulis mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak untuk menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data sangat berhubungan dengan proses pembahasan dan analisis lebih lanjut dari perumusan masalah dan tujuan penelitian.

➤ Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan usaha menarik kesimpulan dari hal-hal yang ditemukan dari pengumpulan data, reduksi data maupun penyajian data. Dalam penelitian ini, kesimpulan terdiri dari dua hal sebagai hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu : implementasi kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, batasan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai profil Kabupaten Purbalingga, profil Kecamatan Kaligondang, dan profil Desa Sidanegara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi yang akan penulis kemukakan sebagai masukan pada *stakeholders* terkait dengan pelaksanaan program tersebut.